



Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS DI SDN Made 1 Surabaya

Ucik Rachmawati , Universitas Negeri Surabaya

 ucik.21006@mhs.unesa.ac.id

Abstract: The researcher conducted this research because he wanted to examine how transparency and accountability are applied in the management of BOS funds in the RKAS program at SD Negeri Made 1 Surabaya. BOS funds require an effective management that is transparent and accountable. The purpose of this research is to recognize and understand how transparency and accountability are applied in the management of BOS funds in the RKAS program at SD Negeri Made 1 Surabaya. This research uses a qualitative approach that is descriptive and the type of research is a case study. Data collection techniques used by researchers are observing, interviewing and documenting. Meanwhile, data analysis is carried out using data condensation, data presentation, and data verification. In testing the validity of the data, researchers also used source triangulation and technical triangulation. The results of this study show that the implementation of transparency and accountability carried out by SD Negeri Made 1 Surabaya can be said to be good. Implementation of transparency by planning the use of BOS funds in an open manner by involving school committees, teachers and education personnel. Meanwhile, accountability can be seen from the results of making and accountability from reporting online and offline.

Keywords: Transparency, Accountability, BOS Funds, RKAS

Abstrak: Peneliti melaksanakan penelitian ini karena hendak menelaah bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SD Negeri Made 1 Surabaya. Dana BOS ini membutuhkan suatu pengelolaan yang efektif yaitu dengan transparan dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengenal serta memahami bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SD Negeri Made 1 Surabaya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif bersifat deskriptif beserta jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti yakni melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara itu, analisis data yakni dilaksanakan dengan menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dalam menguji keabsahan data peneliti juga memakai triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan SD Negeri Made 1 Surabaya dapat dikatakan baik. Pelaksanaan transparansi dengan perencanaan penggunaan dana BOS yang dilakukan secara keterbukaan dengan mengikutkan Komite Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan akuntabilitas dapat dilihat dari hasil pembuatan dan pertanggungjawaban dari pelaporannya secara online dan offline.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana BOS, RKAS

Received 15 April 2023; Accepted 4 Mei 2023; Published 20 Mei 2023

Citation: Rachmawati, U. (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS DI SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3 (02), 212-219.



Copyright ©2023 Jurnal Jendela Pendidikan

Published by CV. Jendela Edukasi Indonesia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Suatu Pendidikan ialah perihal yang esensial dikarenakan orang yang berpendidikan akan dibekali untuk menghadapi tantangan dan permasalahan global dalam kehidupannya. Dan karena mahalnya biaya pendidikan, masyarakat takut untuk menyekolahkan anaknya, sehingga pemerintah menyediakan dana pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Di era globalisasi, pendidikan dikatakan sebagai barang yang mahal untuk masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin karena rendahnya angka keikutsertaan pendidikan pada masyarakat miskin ialah dari biaya pendidikan. Jika pemerintah ingin melahirkan cita-cita pendidikan nasional, maka yang wajib dilakukan adalah menyediakan dana pendidikan.

Bentuk pemberian dana pendidikan yang bersumber melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat yang dipakai dalam membiayai biaya operasional non personalia untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal yang melaksanakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018). Melalui Program Dana BOS, lembaga pendidikan harus mampu mengelola suatu perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh biaya pendidikan tersebut kepada masyarakat dan pemerintah secara transparansi (Oga 2021).

Bahkan ketika dana BOS tersedia untuk memecahkan masalah pendidikan, namun persoalan lainnya akan terus berputar pula. Mulai dari ketidaksesuaian penyediaan dengan kebutuhan kelembagaan, kurangnya keikutsertaan orang tua dalam perencanaan, ketidakefektifan dana BOS dan pengelolaan anggaran, sampai pelaporan, serta penyelenggaraan dan penggunaan aplikasi program dana BOS yang sering berubah dalam praktiknya. Pada pengelolaan dan pelaksanaannya, dana BOS di sekolah pada umumnya juga selalu menghadapi berbagai persoalan penganggaran, penggunaannya, dan pelaporan pertanggungjawabannya. Tak hanya itu, sekolah seringkali tidak menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasinya. Dengan demikian, pengelolaan dana baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat maka sekolah perlu untuk tetap melandasinya dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah sebuah langkah awal yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaannya dilandaskan melalui pelaksanaan dan evaluasi akuntansi secara akuntabilitas dan transparansi. Struktur RKAS meliputi pengelolaan dana BOS (dari pemerintah pusat dan daerah), dengan kepala sekolah membuat satuan kerja pengelola dana BOS. Satuan kerja atau tim tersebut didampingi oleh kepala sekolah untuk menyusun RKAS melalui analisis keperluan sekolah, kemudian baru mengikutsertakan guru dan komite sekolah yang ikut serta dalam perencanaan program dana BOS yang sesuai (Yanti 2021). Setiap menyusun RKAS, keinginanya yaitu agar dapat menciptakan rencana penyelenggaraan sekolah yang efisien dan efektif dengan anggaran yang diagendakan agar mencapai tujuan sekolah. RKAS mencakup faktor-faktor seperti asal pendanaan, penjabaran kegiatan, total biaya satuan, total biaya kurikulum sekolah, dan sebagainya. Dengan munculnya keberadaan RKAS bukan hanya realisasi tujuan saja yang ingin dicapai, tetapi menegnai bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dana BOS tersebut dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Menurut Minarti (Ekowati 2016) mengatakan mengenai transparansi dalam pengelolaan dana lembaga Pendidikan merupakan suatu cara keterbukaan sumber keuangan serta kuantitas, uraian penggunaan dan pertanggungjawabannya hendaklah transparan sehingga dapat mempermudah dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut indeks dari peneliti terdahulu yakni menurut (Lailia 2018): "1) Tidak ada rancangan hukum untuk keterbukaan, 2) Transparansi anggaran tersedia untuk publik, dan 3) Ada audit yang independen dan efektif". Oleh karena itu, transparansi ialah

prinsip yang mengurus ketersediaan atau akses bebas masing-masing orang terhadap informasi tentang tata kelola pelaksanaan, yaitu mengenai kebijakan, proses pembuatan dan penerapannya, serta tercapainya hasil akhir.

Sedangkan akuntabilitas ialah pertanggungjawaban. Dalam konteks ini maka sekolah haruslah akuntabel, yaitu artinya bertanggungjawab untuk pihak pemangku kepentingan baik internal dan eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah. Akuntabilitas yang diterapkan di sekolah harus baik, karena akuntabilitas yang baik akan membuktikan bahwa sekolah sebagai pelaksana Pendidikan telah melakukan tugasnya dengan benar dan terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Heliani, Wahidin, and Susilawati 2022). Selain itu, E. Mulyasa dalam (Shafratunnisa 2015) berpendapat bahwa Akuntabilitas merupakan “tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah dengan mensyaratkan pertanggungjawaban diberikan pada setiap akhir anggaran sekolah dengan mengeluarkan dana selama satu tahun anggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak penerimaan dana BOS di SD Negeri Made 1 Surabaya yang dikelola secara Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kondisi ini menandakan bahwa melalui penggunaan media Online maupun Offline yang sudah dipakai untuk tempat pelaporan hasil performa yang spesifiknya digunakan pada bagian keuangan guna mengelola dana BOS. Hasil yang diperoleh peneliti yakni berupa hambatan yang sedang dialami oleh sekolah yaitu terlambatnya pencairan dana BOS yang membuat setiap sekolah mengalami hambatan tersebut. Keterlambatan ini nyatanya telah tertuang didalam Petunjuk Teknis BOS dimana dana BOS yang hendak dicairkan saat periode tiga bulan berturut-turut ini menjadi pencairan yang bersyarat pada periode bulan terakhir tersebut. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi sekolah karena biaya pegawai pun menjadi tidak teratur yang harus dibayarkan setiap bulannya sehingga tidak menetap pada bulan itu saja melaikan bisa berganti bulan, dikarenakan dana BOS dicairkan pada bulan terakhir setiap triwulan.

Data lain juga ditemukan oleh peneliti, bahwa adanya bentuk transparansi, hal ini dapat dilihat dalam keterlibatan komponen sekolah semacam komite sekolah, staf, guru, dan kepala sekolah, bendahara dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS). Tidak hanya itu, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang ditunjukkan sekolah ditegakkan dengan melaporkan rekapitalisasi penggunaan dana BOS dan selalu dipantau oleh Dinas Pendidikan. Maka pada kondisi ini penulis tertarik untuk mengangkat satu topik yang lebih lanjut mengenai “Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Made 1 Surabaya”.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif, menurut (Anggito, Albi 2018) diartikan bahwa deskriptif penelitian perlu menguraikan suatu obyek, setting social, atau fenomena yang bersifat naratif berupa data dan fakta yang dirangkai dalam bentuk kata atau gambar daripada angka dan kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Pendekatan Kualitatif diperlukan bagi penelitian ini dikarenakan melalui penelitian ini penulis bermaksud akan membahas dan menelaah suatu peristiwa atau kejadian, orang, gejala, maupun cara mengenai dengan suatu Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Made 1 Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus dimana yang dikatakan (Manab 2015), studi kasus merupakan penelitian mendalam yang dipakai melalui sistem terikat dan diambil dari suatu kasus dari waktu ke waktu melalui cara penyatuan keterangan yang intensif dan terperinci sambil mengikutkan sumber-sumber informasi yang sebanyak-banyaknya pada situasi yang komprehensif. Keunikan jenis penelitian studi kasus menurut Gunawan (2013) mengatakan bahwa penelitian menggunakan bentuk studi kasus sangatlah akurat bila dipakai dalam penelitian karena karakternya adalah menguji suatu teori, yang

mana penelitiannya bermaksud untuk mencari uraian dari penyebab suatu kejadian, yang dimuat kedalam suatu objek ataupun sebab dan akibat dari penelitian yang sedang diteliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrumental yang digunakan untuk eksistensi peneliti mengenai prosedur penelitian yang diakui untuk penggunaan instrumen yang tepat dalam penelitian. Dalam penelitian ini keberadaan peneliti sangat penting sekali, dikarenakan peneliti bertugas menjadi pengumpul data. Data yang harus dikumpulkan, harus secara langsung dan objektif, bukan rekayasa dari hasil pemikiran peneliti. Maka dari itu, pada saat pengumpulan data yang dilaksanakan di lapangan secara langsung menjalin hubungan dengan para sumber data agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak mengalami kesulitan. Dengan demikian, sumber data penelitian ini berlandaskan pada orang yang secara terus-menerus terkena pengaruh dari adanya Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS, yaitu meliputi kepala sekolah, Komite Sekolah, Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan (PPTK), Bendahara, dan Masyarakat.

Lokasi penelitian ini di SDN Made 1 Surabaya yang berada di Jl. Raya Made No.31, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya sebagai objek penelitian, karena wilayah tersebut terbilang cukup dekat dengan domisili peneliti sendiri. Selain berdasar pengamatan peneliti dan setelah melakukan proses pengkajian data pada penelitian terdahulu, bahwa tempat ini belum dilakukan oleh para peneliti lain khususnya penelitian yang membahas tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS.

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan dengan memakai teknis analisis data kualitatif, karena data yang didapat adalah keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data. Seperti dikatakan oleh (B. Miles, Matthew, A. Michael Huberman 2014) bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu (1) kondensasi data, (2) display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dipakai untuk menguji kredibilitas data tentang proses Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Made 1 Surabaya, maka pengumpulan beserta pengujian datanya dilakukan kepada kepala sekolah, Komite Sekolah, Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan (PPTK), Bendahara, dan Masyarakat. Sedangkan triangulasi teknik dipakai untuk mengetes kredibilitas data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

HASIL PENELITIAN

Hasil temuan penelitian di SD Negeri Made 1 Surabaya mengenai suatu penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, maka ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya

Pengelolaan dana BOS secara transparansi bisa dinyatakan cukup baik, keadaan tersebut dapat dilihat melalui keterbukaan informasi di SD Negeri Made 1 Surabaya yang baik. Penggunaan dana sekolah didasarkan pada kebutuhan siswa dan berpedoman pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Made 1 Surabaya juga dapat dilihat dari perencanaan penggunaan dana BOS yakni dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dilakukan secara keterbukaan dengan melibatkan Komite Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan.

- b. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya

Implementasi akuntabilitas di SD Negeri Made 1 Surabaya sudah berjalan cukup baik. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Made 1 Surabaya dapat dilihat dari hasil pembuatan dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara berkala dan tepat waktu kepada pemerintah setiap satu sesmester melalui Tim Manajemen BOS. Pelaporan dana BOS yang dilaksanakan SD Negeri Made 1 Surabaya ini menerapkan dengan cara offline dan online.

PEMBAHASAN

1. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya

Menurut hasil temuan penelitian di SD Negeri Made 1 Surabaya mengenai penerapan prinsip transparansi untuk pengelolaan dana BOS yaitu proses pengelolaannya dilaksanakan saat tahap persiapan ataupun saat merencanakan dana BOS. Implementasi Penerapan prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS, yaitu pada bagian persiapan mengelola dana BOS, hal ini sejalan pada Permendikbud No. 2 Tahun 2022 yang memuat Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, berisi tentang Transparansi merupakan pengaturan dana yang dikelola secara terbuka dan sesuai keinginan stakeholder dinas pendidikan yang perlu dipenuhi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2022). Hal itu bermanfaat agar pihak sekolah dapat menerima secara terbuka setiap keinginan dan saran dari masyarakat, sehingga pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Implementasi transparansi yang terjadi di SD Negeri Made 1 Surabaya dilakukan di waktu dana BOS disusun. Dana BOS yang didapat SD Negeri Made 1 ini mencakup jumlah dari siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Jumlah dana yang didapat sekolah didasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar hingga batas waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada pada Petunjuk Teknis Pendanaan BOS. Jumlah siswa yang terdaftar di SD Negeri Made 1 saat ini adalah 409 siswa. Jumlah siswa tersebut yang akan menjadi dasar penentuan besaran dana yang diterima. Jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut akan dikalikan dengan jumlah Rp 1.020.000,00 per siswa selama satu tahun. Dana BOS yang diterima tersebut harus digunakan untuk membiayai pengeluaran non personalia sekolah.

Mekanisme mengenai kebutuhan operasional perlu penerapan transparansi dengan ditegakkannya suatu pendataan yang disiapkan oleh sekolah dan harus dipenuhi sekolah dalam waktu satu tahun pelajaran, yaitu mencakup antara lain pembiayaan segala kebutuhan sarana dan prasarana, pembelajaran dan ekstrakurikuler, gaji guru honorer dan lain-lain. Perencanaan tersebut dirangkai sehingga mewujudkan suatu perencanaan kegiatan yang dinamakan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut (Jumianti 2018) RKAS dirangkai sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, dengan adanya RKAS maka pihak sekolah harus mampu merencanakan kerja tahunan sekolah serta menentukan anggaran pendapatan dan belanja dana BOS tahunan sekolah. Penyusunan RKAS didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari kebutuhan setiap sumber daya manusia .

Transparansi di SD Negeri Made 1 Surabaya dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik mungkin yang cocok dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, RKAS merupakan suatu program yang dapat merencanakan berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dan dibutuhkan oleh sekolah. Adapun gambaran RKAS yang dibuat oleh SD Negeri Made 1 Surabaya adalah dengan penyusunan RKAS melalui rekapitulasi dana BOS yang menggunakan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu berupa standar penilaian Pendidikan, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan. Dari 8 SNP tersebut, pengeluarannya diselaraskan pada keperluan-keperluan

yang penting dan perlu dengan cepat dipenuhi semacam kebutuhan yang paling penting atau mendesak, yaitu operasional sekolah, sumber daya dan layanan berlangganan, serta diikuti pula standar untuk pendidik dan tenaga kependidikan yakni menyediakan dana gaji guru.

Dilihat dari tahap perencanaan keuangan, transparansi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Made 1 Surabaya ini dapat dilihat melalui keterbukaan informasinya sehingga bisa dikatakan cukup baik. Penggunaan dana sekolah didasarkan pada kepentingan siswa dan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah tersebut juga melibatkan Kepala Sekolah, guru, staf dan orang tua dalam mengatur keuangan sekolah, spesifiknya pada pengelolaan dana BOS. Selain itu, sebagai bentuk transparansi publik, SD Negeri Made 1 Surabaya juga telah melaporkan penggunaan dana BOS melalui www.bos.kemdikbud.go.id. Dana BOS yang diterima dipakai untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam sistem Pendidikan selama satu tahun. Maka dari itu, melalui keterbukaan informasinya, prinsip transparansi yang dianut oleh SD Negeri Made 1 Surabaya dikatakan baik.

2. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya

Dana Pendidikan adalah dana yang berasal dari keuangan yang diperuntukkan pada setiap satuan Lembaga Pendidikan, salah satunya yaitu dana BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diartikan sebagai suatu program dari pemerintah yang pada asasnya digunakan dalam mendanai biaya operasional nonstaf untuk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Mujiono 2017). Pemerintah membagikan bantuan dana BOS kepada sekolah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah wajib mengelola dana BOS dengan sebaik-baiknya, yang mana pengelolaannya harus sebanding dengan standar pengelolaan yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan ini maka dapat dicapai melalui penggunaan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pengelolaan dana BOS di SD Negeri Made 1 Surabaya ini diawali dengan pelaksanaan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Sekolah mengembangkan rencana berdasarkan uraian keperluan selama satu tahun. Melalui penyusunan RKAS ini, seluruh unsur instansi ikut serta memberikan Kerjasama terhadap terwujudnya tujuan pengelolaan dana BOS. Di SD Negeri Made 1 Surabaya beberapa guru ditugaskan untuk menjadi koordinator structural dana BOS semacam koordinator pada keuangan, siswa, sarana dan prasarana dan sebagainya. Kemudian setiap koordinator diberikan tugas berupa selembaran untuk menuliskan apa saja yang diperlukan dan yang diutamakan oleh sekolah, sehingga sesuatu yang diperlukan dapat dibelanjakan atau dibetulkan. Maka dari itu, pengelolaan dana BOS dikerjakan dengan melngikutsertakan unsur sekolah untuk penggerak Pendidikan.

Pada penyusunan RKAS, semua staf pengajar di SD Negeri Made 1 Surabaya bergotong royong merumuskan apa saja program-program yang akan diadakan saat penyusunan RKAS dalam waktu satu tahun sehingga pada persiapan ini bisa diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan. Namun SD Negeri Made 1 Surabaya tidak fokus pada kebutuhan Lembaga saja tetapi juga memahami penerimaan dan pencairan dana BOS maka pengelolaan dana BOS dapat optimal. Tak hanya itu, kedudukan kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara sama pentingnya dengan peran kedudukan guru. dikarenakan peraturan penggunaan dana BOS perlu mendapat persetujuan oleh kepala sekolah. Menurut pendapat (Lailia 2018) menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bersangkutan pada dana BOS, maka proses pengelolaan mulai dari merencanakan hingga melaporkan perlu diperlihatkan oleh kepala sekolah.

Dalam hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi akuntabilitas di SD Negeri Made 1 Surabaya sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat pada pembuatan dan pelaporan hasil pertanggungjawaban pendanaan BOS yang telah disampaikan kepada pihak terkait yaitu pihak terkait yaitu pemerintah selaku penyedia dana BOS dan civitas sekolah sebagai penerima dana BOS. Pelaporannya dilakukan setiap satu semester berdasarkan pencairan

dana yang dilakukan oleh admin dan dibantu bendahara yang disahkan oleh kepala sekolah. Pelaporan dana BOS yang dilaksanakan SD Negeri Made 1 Surabaya ini menerapkan cara offline dan online. Secara offline yakni diperlihatkan melalui pertanggungjawaban sekolah dalam memberikan bukti hasil pengelolaan dana BOS pada komite sekolah serta orang tua siswa juga jika ingin mengetahuinya. Pelaporan offline dilaksanakan saat rapat dan saat ada kegiatan yang mempunyai dana anggaran banyak. Sedangkan pelaporan secara online yaitu saat pelaporan dana BOS kepada pemerintah melalui web www.bos.kemdikbud.go.id. yaitu dengan menyertakan SPJ yang dibelanjakan agar diperiksa laporan keuangannya untuk menentukan sesuai atau tidaknya SPJ tersebut. Kalau tidak sesuai maka akan diperbaiki lagi dan akan dilaporkan kembali. Dalam pembukuan untuk penggeluaran dana yang digunakan sekolah, SD Negeri Made 1 Surabaya juga menyisipkan kwitansi secara online untuk bukti penggeluarannya sehingga belanjanya sekarang melalui online yaitu pada <https://siplah.kemdikbud.go.id/> jadi pada web tersebut sudah ada dokumentasi serta sekarang sudah ada kwitansinya juga pada web dan bukan manual lagi sehingga sekolah hanya perlu mendownloadnya saja. Kemudian akan disahkan dengan tanda tangan serta stempel dari pihak penyedia. Proses tersebut sudah resmi dengan melampirkan bukti bayar pihak pengelola BOS ke bank jadi bukan melalui transfer ke bank melainkan ke rekening penyedianya.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penerapan akuntabilitas di SDN Made 1 Surabaya telah berjalan dengan baik. Pelaporannya tidak melaporkan kepada yang memberi dana BOS saja melainkan pada penerima dana tersebut juga.

SIMPULAN

Dapat diberi kesimpulan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas untuk mengelola dana BOS dalam program RKAS di SD Negeri Made 1 Surabaya saling terkait dan sudah berjalan dengan baik. Sekolah menerapkan transparansi pada tahap perencanaan yaitu sekolah memberikan informasi melalui keterbukaan untuk umum dan mengikutkan orang tua. Selain itu, penggunaan dana didasarkan pada keperluan siswa dengan mengacu pada Standar Pendidikan Negara, dan prinsip transparansi bahwa proses manajemen partisipasi masyarakat dilakukan secara transparan dan melibatkan semua komponen sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Partisipasi ini tercermin dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS).

Sedangkan penerapan akuntabilitas yang terjadi di SD Negeri Made 1 Surabaya ini juga sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaporan dana BOS yang bukan difokuskan untuk pemberi dana saja, melainkan penerima dana juga akan diberitahu. Laporan tersebut akan disetorkan kepada dinas pusat percaturwulan serta dilaporkan pula kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan dana tersebut, salah satunya komite sekolah. Pelaporannya juga dilakukan baik secara online dan offline serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan sekolah kepada masyarakat berupa laporan LPJ.

Adapun saran yang bisa diberikan peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan yakni sebagai berikut:

1. Kepada sekolah yang mengelola dana BOS semestinya wajib memantau atau mengontrol mengenai pemakaian dana BOS agar memperoleh informasi mengenai kebutuhan dalam proses pelayanan permintaan serta memantau dan meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan dana BOS dilihat melalui hasil laporan yang diberikan sekolah kepada dinas pusat. Pelaporan ini juga harus dilakukan secara lebih efektif dan dengan cara yang efisien untuk mencapai pengendalian dana BOS dan manajemen mutu sekolah yang jauh berkualitas lagi.
2. Untuk peneliti selanjutnya diinginkan agar bisa menelaah dalam cakupan yang bertambah luas serta mendalam sehingga artikel ini dapat menjadikan artikel ini sebagai bahan acuan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dalam program RKAS dan mendapatkan perbedaan yang lebih banyak pada keadaan yang beda sehingga menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anggito, Albi, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edited by E. D. Lestari. Sukabumi: CV Jejak.
2. B. Miles, Matthew, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Jakarta: Sage Publications.
3. Ekowati, Santi. 2016. "PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Kasus Di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan) Skripsi G [IK]." *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bos* 1-168.
4. Heliani, Dede Wahidin, and Erma Susilawati. 2022. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah." *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(2):56-65. doi: 10.52005/aktiva.v2i2.45.
5. Jumianti. 2018. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN." (21):1-9.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. "Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018." 2013-15.
7. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 2022. "RANCANGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022." 54.
8. Lailia, Umi Nur. 2018. "Analisa Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 3 Malang." *Jurnal Akuntansi* Vol.4(No.2):77-93.
9. Manab, Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*.
10. Mujiono. 2017. "ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Oleh." *Jurnal Ilmu Manajemen* 4(2):257-64.
11. Oga, Ermita. 2021. "DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI 329 INPRES Diajukan Oleh :"
12. Shafratunnisa, Fierda. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di SD Islam Binakheir (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).*
13. Yanti, Ni Luh Tina. 2021. "PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP N 3 SUKAWATI." 139-51.

PROFIL SINGKAT

Ucik Rachmawati adalah mahasiswa program studi manajemen pendidikan, fakultas ilmu pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Selain itu ia adalah seorang peneliti dari penelitian ini.